

**Pendapat dan Kesimpulan Komite Audit
atas Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan ITB
Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2013**

I. Dasar Hukum

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 44 tanggal 12 April 2012 dan Undang-undang No. 12 tanggal 10 Agustus 2012 dan PP. 74 tahun 2012, ITB telah merubah kebijakan akuntansi dari acuan PP RI No. 155/2000 yang mengatur Badan Hukum Milik Negara ke dalam pola Badan Layanan Umum, untuk memenuhi ketentuan pelaporan keuangan sebagai lembaga Pemerintah, ITB menerbitkan Laporan Keuangan yang Berakhir 31 Desember 2013 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk kepentingan pemangku kepentingan di luar Pemerintah dan sebagai analisa perbandingan ITB menerbitkan Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2012 dan yang berakhir 31 Desember 2013 telah disesuaikan dengan merujuk pada PSAK 45 standar akuntansi untuk entitas nirlaba.

II. Lingkup Pekerjaan Audit

Lingkup pekerjaan oleh Auditor Independen adalah melakukan audit atas Laporan Keuangan ITB untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2013 yang diterbitkan sesuai PSAK 45 yang meliputi:

- (1) Laporan Auditor Independen Satuan Usaha Komersial (SUK),
- (2) Laporan Auditor Independen Satuan Kekayaan dan Dana (SKD),
- (3) Laporan Auditor Independen Satuan Akademik (SAk),
- (4) Laporan Auditor Independen Gabungan ITB,
- (5) Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- (6) Laporan Evaluasi terhadap Pengendalian Intern,
- (7) *Management Letter* yang mencakup mengenai observasi dan rekomendasi untuk perbaikan pengendalian intern, sistem dan prosedur pelaporan manajemen,

III. Independensi Auditor Eksternal

Mengacu kepada prosedur pengadaan jasa audit (kantor akuntan publik) Institut Teknologi Bandung sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan jasa akuntansi untuk audit Laporan Keuangan ITB Tahun 2013, Komite Audit meyakini bahwa Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih (KAP KBS), yang melaksanakan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan ITB akhir tahun 2013, adalah independen.

IV. Proses Audit

Komite Audit berpendapat bahwa proses audit oleh KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. Oleh karenanya kesimpulan yang diperoleh dan opininya dapat dipakai sebagai acuan untuk pendalaman dan melakukan tindak lanjut oleh manajemen ITB.

V. Hasil Pekerjaan Audit

Hasil pekerjaan audit terhadap Laporan Keuangan ITB Tahun 2013 dilaporkan dalam 7 (tujuh) dokumen, sebagai berikut:

- (1) Laporan Auditor Independen No. 038/SK/KA/L/V/2014 dan Laporan Keuangan Gabungan ITB Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
- (2) Laporan Auditor Independen No. 039/SK/KA/L/V/2014 dan Laporan Keuangan Satuan Akademik (SAk) ITB Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
- (3) Laporan Auditor Independen No. 040/SK/KA/L/V/2014 dan Laporan Keuangan SUK ITB PTN BH Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
- (4) Laporan Auditor Independen No. 041/SK/KA/L/V/2014 dan Laporan Keuangan SKD ITB PTN BH Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
- (5) Laporan Auditor Independen No. 042/SK/KA/L/V/2014 dan Laporan Keuangan Kepatuhan ITB PTN BH Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
- (6) Laporan Auditor Independen No. 043/SK/KA/L/V/2014 dan Laporan Keuangan Sistem Pengendalian Internal ITB PTN BH Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;
- (7) Management Letter No. 002/KA/ML/V/2014 Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012;

VI. Pendapat Komite Audit atas Substansi Laporan Auditor Independen KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih atas Laporan Keuangan ITB Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2013

Komite Audit pada rapat tanggal 31 Mei 2014 mendengarkan paparan KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih, untuk mendapat pemahaman atas laporan hasil pemeriksaan tersebut di atas. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian atau memerlukan tindak lanjut Majelis Wali Amanat adalah sebagai berikut:

- (i) Perbedaan perlakuan akuntansi antara standar SAP dan PSAK.

Dalam Laporan Operasional, penyajian nilai penerimaan DIPA telah habis untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Sedangkan menurut realisasinya sebagian pembelanjaan DIPA tersebut termasuk belanja Modal (aset), sehingga menimbulkan perbedaan intrepetasi atas penyajian dalam laporan keuangan, yakni:

- Laporan Operasional untuk Penerimaan DIPA disajikan tidak mencerminkan kinerja operasional secara utuh karena didalamnya ada reliasasi belanja aset yang seharusnya di catat dalam kelompok Neraca.
- Untuk menjembatani perbedaan standar tersebut, dalam laporan keuangan ITB, pembelian aset yang sumber dananya dari DIPA dicatat sebagai pembelian dari dana masyarakat
- Penyajian seperti ini akan berpotensi mengurangi kepercayaan pembaca laporan keuangan sehubungan adanya re-alokasi pembiayaan dari dana masyarakat ke DIPA.

Mengingat sumber keuangan ITB bermacam-macam yang mengharuskan pelaporan dengan standar akuntansi yang berbeda (PSAK, SAP) maka untuk keperluan membuat Laporan Konsolidasi ITB, maka Komite Audit menyarankan agar ITB mengambil inisiatif untuk mengajukan kepada Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia untuk melakukan penentuan dan merumuskan Standar Akuntansi untuk PTN BH.

- (ii) Berdasarkan laporan keuangan anak perusahaan (UUK) yang telah diaudit anak-anak perusahaan (UUK) menerapkan kebijakan akuntansi laporan keuangan mengacu kepada SAK ETAP, sedangkan laporan keuangan ITB PTN BH mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (NON ETAP). Manajemen Anak Perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan. Perbedaan standard ini diatasi dengan menetapkan Laporan Keuangan Satuan Usaha Komersial dan ITB PTN BH tidak mengkonsolidasi laporan anak

perusahaan (UUK) yang kepemilikan sahamnya di atas 50% atau dibawah 50% tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap anak perusahaan (UUK), sesuai dengan PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasi.

- (iii) Terkait dengan masalah UUK, antara lain masalah piutang PT. Lapi Ganeshatama dan PT. Trimitra yang belum terselesaikan, disarankan agar menyusun standar kontrak kerja yang diberlakukan untuk setiap UUK dan mengharuskan agar kontrak kerja baru direview oleh Dewan Komisaris dan Direksi dari UUK bersangkutan untuk memastikan kesesuaian dengan standar tersebut agar menghindari resiko ITB sebagai pemegang saham.
- (iv) Kemajuan telah dicapai dalam penyusunan Laporan Keuangan ITB, antara lain, sebagian besar temuan audit sebelumnya sudah ditindaklanjuti, penyusunan Laporan Keuangan ITB *unaudited* dilaksanakan sesuai PSAK dan tepat waktu. Kinerja pengelola fungsi ini perlu tetap dipertahankan. Upaya-upaya untuk mengintegrasikan berbagai proses akuntansi yang berbasis aplikasi *Oracle Financial* dan aplikasi *Non-Oracle Financial*, upaya untuk meningkatkan kompetensi, disiplin SDM, serta upaya untuk melengkapi SOP hendaknya tetap dilanjutkan.
- (v) Sebagian proses akuntansi pendapatan kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM), Piutang dan Hutang Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPPM masih dilakukan paralel secara manual yaitu dengan proses inventarisasi dokumen (manual) melengkapi proses akuntansi online *Oracle Financial*. Pada tahun ini, proses akuntansi untuk kegiatan PPM yang dilaksanakan oleh fakultas dapat dilakukan lebih akurat dan lebih tepat waktu dari tahun lalu. Masih perlu penyempurnaan pada proses rekonsiliasi laporan Direktorat Keuangan dengan yang dibuat oleh LPPM/Fakultas.
- (vi) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan PPh Pasal 21 menurut data yang diperoleh dari Direktorat Kepegawaian, terdapat beberapa kesalahan hitung yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku, yaitu pengenaan tarif bagi pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ITB maupun pegawai non PNS ITB yang tidak memiliki NPWP dihitung berdasarkan tarif normal.
- (vii) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan teknologi informasi (TI) melalui pengintegrasian fungsi pengelola TI, termasuk pengintegrasian implementasi dan manajemen Aplikasi Teknologi Informasi termasuk *Oracle* dan *Non-Oracle*, dengan membentuk satu Unit Organisasi yang mempunyai kewenangan lintas departemen dan melakukan *design, development, implementation, dan maintenance* aplikasi-

aplikasi TI. Unit ini direkomendasikan dipimpin oleh seorang *chief information officer* (CIO) yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

VII. Kesimpulan Komite Audit

- (i) Laporan Keuangan ITB Tahun 2013 yang disertai dengan semua laporan pekerjaan audit oleh auditor independen seperti dirinci dalam bab V di atas dapat diteruskan ke Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada kalangan internal ITB disertai dengan pertimbangan agar semua laporan yang disampaikan tersebut dapat dimasukkan ke dalam *public domain*;
- (ii) Opini audit tahun 2013 adalah sama dengan opini tahun sebelumnya. Namun, proses akuntansinya harus terus disempurnakan dan audit UUK secara menyeluruh harus tetap dipertahankan;

VIII. Saran Komite Audit

- (i) Mengusulkan kepada Direktorat Keuangan untuk memastikan bahwa *management letters* dari audit ini disampaikan kepada masing-masing departemen yang berkepentingan untuk ditindak-lanjuti sehingga pada tahun berikutnya permasalahan yang sama tidak muncul lagi.
- (ii) Mendorong saran dan rekomendasi dalam setiap laporan audit yang tersebut dalam bab V untuk dikaji dan didalami lebih lanjut oleh manajemen ITB.
- (iii) Terkait dengan ITB belum memiliki struktur organisasi TI yang bertanggung jawab mengelola TI secara menyeluruh dan terintegrasi, maka disarankan perlunya mengembangkan struktur tersebut yang dipimpin oleh CIO.
- (iv) Masalah Sistem Informasi Penelitian & Pengabdian pada Masyarakat (SIPPM) yang dimiliki oleh LPPM tidak difungsikan secara maksimal, dikarenakan input dari kegiatan laporan kerma sebagian besar belum menggunakan fasilitas yang sudah disediakan dan masih dikerjakan secara manual. SPI dan Direktorat Keuangan disarankan untuk mencari penyebab dan solusi terhadap masalah ini.
- (v) ITB melakukan persiapan implementasi SA 600 & 700 yang akan efektif berlaku tahun 2014.
- (vi) Menyediakan SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pengembangan, implementasi dan perawatan sistem aplikasi keuangan dan akuntansi ITB.

IX. Penghargaan

Menghargai kebijakan dan upaya eksekutif ITB untuk mempertahankan infrastruktur dan kinerja pengelolaan akuntansi & keuangan ITB yang memenuhi PSAK dalam masa transisi yang penuh ketidakpastian pada tahun 2012 dan 2013.

X. Penutup

Pendapat, Saran dan Kesimpulan Komite Audit atas Laporan Audit ITB Tahun 2013 oleh Auditor Independen dalam dokumen ini dirumuskan sesuai dengan prosedur yang disepakati dalam rapat Komite Audit yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 dengan tujuan untuk disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.

Bandung, 31 Mei 2014

Komite Audit,

Filino Harahap, Ph.D, Sekretaris/Plt Ketua

Prof. Dr. Irwandy Arif, Anggota

Ir. Prasetyo Suhardi, Anggota

Drs. Soedarjono, Akt, CFE., Anggota

Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, SH., Anggota

Untuk Komite Audit,
Sekretaris/Plt Ketua,

Filino Harahap, Ph.D